



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**RENJA
(PERUBAHAN)
TAHUN 2019**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Jl. SOEKARNO-HATTA NO. 37 BANGKALAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Program / Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, 23 Juli 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian renstra Perangkat Daerah 2018.....	8
---	---

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan 2018.....	13
--	----

BAB VI PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencan kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena itu ada 4 Program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Fasilitasi Integrasi Bangsa
3. Program Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
4. Program Pemantuan Kajian Strategi

Program tersebut diatas tersebut penting untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2019, karena program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesjahteraan masyarakat dan khususnya akan dapat menambah partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam Berpolitik, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur serta pada tahun 2019 dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran Pembnagunan Bangkalan tahun 2019.

Bangkalan, 2019
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari kinerja 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus

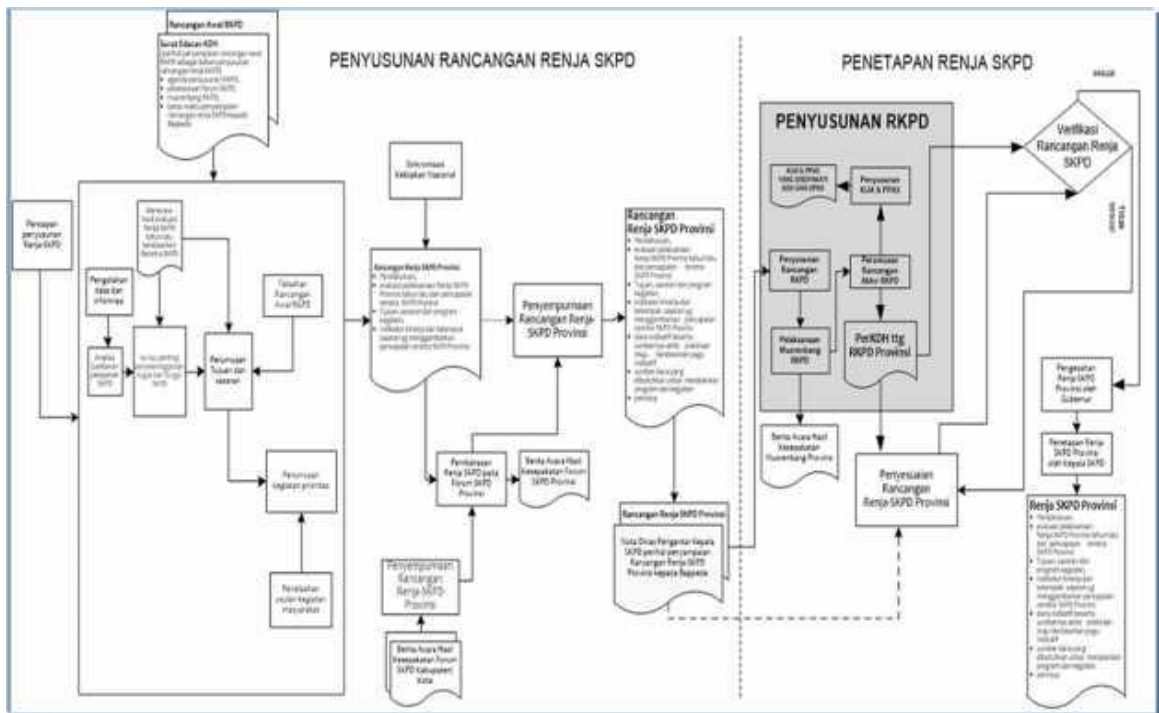
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrebang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar.1



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renjana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri.....Tentang Renstra K/L
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standart pelayanan minimal (bagi perangkat Daerah yang memiliki target SPM).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 Nomor 7/E).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 27/E)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 271 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2013 Nomor 8/D)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 455)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 121)

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perubahan tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019. Sedang tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk mengetahui Perubahan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagai berikut:

❖ BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

❖ BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat daerah.

❖ BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel Matriks rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

❖ BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER

TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja pembangunan badan kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pada tahun 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan, Revisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019 dapat disimak penjelasan dibawah ini :

- Dari 4 program dan 24 kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian Realisasi yaitu :

A. Program Pelayanan Kesekretariatan

1. Penyediaan barang dan jasa perkantoran
 - Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan
 - Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan
2. Kedinasan dalam daerah dan luar daerah
 - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan
 - Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan
3. Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
 - Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun
4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur

- Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara
 - Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Jumlah jenis prasarana aparatur yang diadakan
 - Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan
 - Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan
6. Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah
- Jumlah data dan informasi PD
 - Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun
 - Jumlah Dokumen penganggaran PD yang tersusun
7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
- Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)
 - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun.
8. Penyusunan Laporan Keuangan
- Jumlah laporan keuangan PD yg tersusun persemester/prognosis/akhir tahun
9. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Propinsi/Nasional
- Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan haribesar yang di fasilitasi

B. Progsam Fasilitasi Integrasi Bangsa

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi

2. Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat

- Jumlah peserta pelatihan/penataran kader Bela Negara serta pembagian modul
- Jumlah peserta bela negara
- Jumlah peserta sosialisasi pada masyarakat non PNS

3. Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas

- Jumlah peserta Forum Pembauran Bangsa yg mendapatkan sosialisasi

C. Program Fasilitas Hubungan Antar Lembaga

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan

- Jumlah lap.monev, belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan

2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang berpolitik

- Jumlah peserta penyuluhan

3. Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Jumlah LSM

4. Penyelenggaraan PEMILU

- Jumlah PILEG dan PILPRES

5. Fasilitas bantuan keuangan partai politik

- Jumlah peserta fasilitas bantuan keuangan parpol

D. Program Pemantauan Kajian Strategis

1. Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

- Jumlah peserta Sosialisasi

2. Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO

- Pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing

3. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi politik di daerah

- Jumlah pemantauan

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 100% yang meliputi 4 program yaitu : Program peningkatan pelayanan kesekretariatan, Program fasilitasi Integrasi Bangsa, Program fasilitasi hubungan antar lembaga, Program pemantauan kajian strategis.
- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPAtahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dengan menggunakan indicator capaian program dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018–2023. Dengan terpenuhinya target Renstra Perangkat daerah yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.
- Belum tercapainya target karena terdapat program/kegiatan yang masih belum dilaksanakan pada Tahun 2019 dikarenakan ada pemotongan

anggaran (efisiensi anggaran) dan diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan tahun 2019.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan secara langsung terwujud dalam meningkatnya semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, meminimalisir konflik ditengah masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik hal ini tentunya tertuang dalam tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-factor penyebab terhambatnya pelaksanaan proram/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program di tahun berjalan. Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019 disesuaikan dengan Renstra SKPD baik dari sasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu pada indikator tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun berjalan sebagaimana tertera dalam lampiran Tabel 2.1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi 4 Program dan 20 Kegiatan yaitu antara lain:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Fasilitasi Integrasi Bangsa
3. Program Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
4. Program Pemantauan Kajian Strategis

Sedangkan kegiatannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik antara lain :

- 1) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 2) Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
- 3) Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6) Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah
- 7) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan
- 9) Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/asional
- 10) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

- 11) Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat
- 12) Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)
- 13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan
- 14) Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik
- 15) Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 16) Penyelenggaraan PEMILU
- 17) Bantuan Keuangan Partai Politik
- 18) Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- 19) Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO
- 20) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi politik di daerah

4.1 Matriks Rancangan Perubahan rencana kerja (Renja) Tahun 2019 Badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2019 tertera dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD 2019 (DPA PD Th.2019)				Perubahan Renj Tahun 2019				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan) **)
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (10-6)	13
0.00.6	Program Pelayanan Kesekretariatan											
0.00.16.01	Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Kab. Bangkalan	17 jenis	188,502,307	APBD	Kab. Bangkalan	17 jenis	188,502,307	APBD	-	
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Kab. Bangkalan	9 jenis	874,845,450	APBD	Kab. Bangkalan	9 jenis	874,845,450	APBD	-	
0.00.16.02	Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	30 kl	3,500,000	APBD	Kab. Bangkalan	30 kl	3,500,000	APBD		
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	100 kl	78,500,000	APBD	Kab. Bangkalan	100 kl	158,232,278		79,732,278	
0.00.16.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	Kab. Bangkalan	12 bln	15,427,800	APBD	Kab. Bangkalan	12 bln	15,427,800	APBD	-	
0.00.16.04	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Kab. Bangkalan	11 jenis	60,937,619	APBD	Kab. Bangkalan	11 jenis	65,937,619	APBD	5,000,000	
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara		1 unit				1 unit				

0.00.16.05	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana aparatur yang diadakan	Kab. Bangkalan	17 jenis	38,500,000	APBD	Kab. Bangkalan	17 jenis	38,500,000	APBD	-	
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	Kab. Bangkalan									
		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	Kab. Bangkalan									
0.00.16.08	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD	Jumlah dokumen penganggaran PD yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	-	
		Jumlah data dan informasi PD	Kab. Bangkalan	1 data	5,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 data	5,000,000			
		Jumlah dokumen perencanaan PD yg tersusun	Kab. Bangkalan	2 dok	15,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	2 dok	15,000,000			
0.00.16.09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD,Renja/RKPD)	Kab. Bangkalan									
		Jumlah laporan capkin dan ikhtisar realisasi kinerja PD yg tersusun	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	-	
0.00.16.10	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	5,000,000	APBD	-	
0.00.16.11	Kegiatan Fasilitas Hari Jadi	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka hari jadi bangkalan	Kab. Bangkalan	1keg	15,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1keg	15,000,000	APBD	-	
6.01.22	Program Fasilitas Integrasi Bangsa					APBD				APBD	-	
6.01.22.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta sosialisasi pada masyarakat non PNS	Kab. Bangkalan	231 or	150,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	231 or	150,000,000	APBD	-	

6.01.22.02	Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat	Jumlah sosialisasi pada masyarakat non PNS	Kab. Bangkalan	864 or	305,178,724	APBD	Kab. Bangkalan	864 or	305,178,724	APBD	-	
		Upacara bela negara	Kab. Bangkalan	115 or	50,000,000		Kab. Bangkalan	115 or	50,000,000		-	
		Jumlah pelatihan /penataran serta pembagian modul kader bela negara										
6.01.22.03	Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)	Jumlah peserta forum pembauran bangsa	Kab. Bangkalan	84 or	150,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	84 or	150,000,000	APBD	-	
6.01.23	Program Fasilitas Hubungan Antar Lembaga										-	
6.01.23.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan	Jumlah laporan monev,belanja hibah,bansos dan bantuan keuangan	Kab. Bangkalan	1 dok	12,329,100	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	12,329,100	APBD	-	
6.01.23.02	Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik	Jumlah peserta penyuluhan	Kab. Bangkalan	140 or	17,925,200	APBD	Kab. Bangkalan	140 or	17,925,200	APBD	-	
6.01.23.03	Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Jumlah peserta forum LSM	Kab. Bangkalan	120 or	21,130,200	APBD	Kab. Bangkalan	120 or	21,130,200	APBD	-	
		Jumlah orkemas yang terdaftar	Kab. Bangkalan									
		Laporan hasil pengawasan	Kab. Bangkalan									
6.01.23.04	Penyelenggaraan PEMILU	Jumlah PILPRES dan PILEG	Kab. Bangkalan	1 keg	900,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 keg	858,957,722	APBD	(41,042,278)	dtake over k SPPD
6.01.23.06	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta fasilitasi bantuan keuangan parpol	Kab. Bangkalan	30 or	13,810,200	APBD	Kab. Bangkalan	30 or	13,810,200	APBD	-	

6.01.24	Program Pemantauan Kajian Strategis											-	
6.01.24.01	Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Bangkalan	140 or	71,018,200	APBD	Kab. Bangkalan	140 or	176,018,200	APBD			
6.01.24.02	Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO	Pemantauan terhadap orang asing	Kab. Bangkalan	1 dok	4,695,200	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	4,695,200	APBD		-	
6.01.24.04	Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi politik di daerah	jumlah pemantauan	Kab. Bangkalan	1 dok	70,000,000	APBD	Kab. Bangkalan	1 dok	26,310,000	APBD	43,690,000		di take over k SPPD dan pemeliharaan

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabupaten Bangkalan**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESBANG DAN POLITIK
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.207/2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Bahwa Rencana Kerja merupakan Instrumen pertanggung jawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 2. Pemerintahan Daerah;
Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000

3. tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
5. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
6. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
7. Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
9. Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
 11. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
 13. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
 14. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
 15. rencana kerja pemerintah daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (*Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2008 Nomor 310*);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor
 16. .. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

- fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
18. Kabupaten Bangkalan tahun 2018;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016,
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
19. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkalan
Nomor 188.45/ /Kpts/433.206/2018, tentang Tim
Penyusun Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten
tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja)
Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2019,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I: Pendahuluan
Bab II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V: Penutup

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS
tahun 2019.

KETIGA :

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Kabupaten Bangkalan beserta jajarannya dalam rangka

KEEMPAT : penyelenggaraan program kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
KELIMA : apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESBANG DAN POLITIK

JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577

BANGKALAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.207/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2019

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
2. Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
3. tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
5. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
7. Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
 8. Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas
 11. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun
 12. 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
 13. 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
 14. rencana pembangunan panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2008
 15. *Nomor 310)*;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor .. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 16. Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;

- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bakesbangpol

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 terdiri dari pejabat dilingkup Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN

TANGGAL:

NOMOR :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN BAKESBANGPOL
KABUPATEN TAHUN 2019

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	SEKRETARIAT		
	Ketua	Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM	Kepala Badan
	Wakil Ketua	SUBAGIO SUHARTA, S. Sos	Sekretaris
	Sekretaris	TAUFIKURAKHMAN, SE	Perencanaan dan Evaluasi
	Anggota	MOHAMMAD HILMI, S. Pd	Kasubag Umum
		NURMA PRIYANTINI, SE	Kasubag Keuangan
2	Bidang Integrasi Bangsa		
	Koordinator	MUHAMMAD QOMARI, SAP	KABID IB
		MASJURI, SH	KASUBBID KETAHANAN BANGSA
		ACHMAD FATHONI, S.Ip. M.Si	KASUBBID PEMBAURAN BANGSA
3	BIDANG HAL		
	Koordinator	R ACH MULJONO, SH	KABID HAL
		ABDUL AZIZ FURQON, SAP	KASUBBID HUBUNGAN PARPOL
		TAUFIQUR RUHMAN, SE	KASUBBID HUB. LSM, ORMAS ORPROF
4	BIDANG KASTRA		
	Koordinator	SAWARI, SH	KABID KASTRA
		SAIFUDDIN, SE	KASUBBID IPOLEKSOSBUD
		AHMADI SAFAR, SE	Pj. KASUBBID PEMANTAUAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

